

Determinan *Ability to Pay* dan *Willingness to Pay* Iuran Jaminan Kesehatan Nasional pada Peserta Mandiri di Kecamatan Alam Barajo

Finta Suszeiny^{1*}, Adila Solida², Rumita Ena Sari³, Silvia Mawarti Perdana⁴

¹⁻⁴ Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Jambi, Indonesia

Email: suszeinyfinta@gmail.com^{1*}, adilasolida@unja.ac.id², rumita_ena@unja.ac.id³, silviamp@unja.ac.id⁴

*Penulis Korespondensi: suszeinyfinta@gmail.com

Abstract. The National Health Insurance (JKN) program faces the challenge of premium arrears among self-enrolled participants, particularly in Alam Barajo Subdistrict, which has the highest amount of arrears in the city of Jambi. This situation is related to participants' willingness to pay and ability to pay their premiums. This study aims to identify the determinants associated with willingness to pay and ability to pay JKN premiums among self-enrolled participants in Alam Barajo Subdistrict. The study employs a quantitative approach with a cross-sectional observational design. The study population consists of residents of Alam Barajo Subdistrict, with a sample of 106 self-enrolled JKN participants selected using cluster sampling. Data were collected via a questionnaire and analyzed using the chi-square test with a significance level of 0.05. Education was not associated with willingness to pay, whereas knowledge, income, history of catastrophic illness, and service quality were associated with willingness to pay. Education and income were associated with Ability to Pay. Willingness to pay JKN premiums was influenced by knowledge, income, history of catastrophic illness, and quality of service, while ability to pay was influenced by education and income.

Keywords: *Ability to Pay*; Independent Participant; National Health; Social Security Contribution; Willingness to Pay.

Abstrak. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menghadapi tantangan berupa tunggakan iuran peserta mandiri, terutama di Kecamatan Alam Barajo yang memiliki jumlah tunggakan tertinggi di Kota Jambi. Kondisi tersebut berkaitan dengan kemauan (*Willingness to Pay*) dan kemampuan (*Ability to Pay*) peserta dalam membayar iuran. Penelitian ini bertujuan mengetahui determinan yang berhubungan dengan *Willingness to Pay* dan *Ability to Pay* iuran JKN pada peserta mandiri di Kecamatan Alam Barajo. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan rancangan observasional *cross sectional*. Populasi penelitian adalah penduduk Kecamatan Alam Barajo dengan sampel sebanyak 106 peserta JKN mandiri yang dipilih menggunakan *cluster sampling*. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan uji *Chi-Square* dengan tingkat kemaknaan 0,05. Pendidikan tidak berhubungan dengan *Willingness to Pay*, sedangkan pengetahuan, pendapatan, riwayat penyakit katastrofik, dan kualitas layanan berhubungan dengan *Willingness to Pay*. Pendidikan dan pendapatan berhubungan dengan *Ability to Pay*. Kemauan membayar iuran JKN dipengaruhi oleh pengetahuan, pendapatan, riwayat penyakit katastrofik, dan kualitas layanan, sedangkan kemampuan membayar dipengaruhi oleh pendidikan dan pendapatan.

Kata Kunci: *Ability to Pay*; Iuran Jaminan; Kesehatan Nasional; Peserta Mandiri; *Willingness to Pay*.

1. LATAR BELAKANG

Jaminan Kesehatan Nasional dapat didefinisikan sebagai jaminan berupa perlindungan kesehatan sehingga peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Jaminan ini diberikan kepada setiap individu yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran mereka dibayarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Setiap individu yang terdaftar dalam program JKN berhak menerima manfaat pelayanan kesehatan perorangan yang mencakup layanan promosi kesehatan, pencegahan penyakit, rehabilitasi, dan paliatif, termasuk penyediaan obat-obatan serta bahan medis sekali pakai. Program JKN dikelola dan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan menggunakan prinsip gotong-royong, nirlaba, keterbukaan, akuntabilitas, dan kepesertaan yang bersifat wajib.

Peserta JKN terdiri dari dua kelompok yaitu Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Peserta non PBI. Peserta PBI adalah peserta program JKN yang menerima bantuan iuran dari pemerintah. Kelompok ini ditetapkan oleh Kementerian Sosial berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terdiri dari orang yang memiliki ekonomi rendah atau tidak mampu dan fakir miskin. Sedangkan peserta non PBI adalah peserta program JKN yang membayar iuran secara mandiri dan tidak menerima bantuan iuran dari pemerintah. Kelompok non PBI ini dibagi lagi menjadi 3 kategori yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan Bukan Pekerja (BP) (Latifah et al., 2020).

Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau yang sering disebut sebagai pekerja mandiri adalah orang-orang yang bekerja atau berusaha untuk mendapatkan upah atas resiko mereka sendiri tanpa memiliki kontrak kerja formal dengan pemberi kerja. Untuk dapat memperoleh manfaat jaminan kesehatan, kelompok ini harus mendaftarkan diri dan anggota keluarganya secara mandiri ke BPJS Kesehatan dan membayar iuran tepat waktu, paling lambat pada tanggal 10 setiap bulannya. Apabila pembayaran iuran melewati tanggal 10, status kepesertaan akan dinonaktifkan sementara sampai tunggkan iuran dibayarkan.

Iuran jaminan kesehatan adalah jumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, atau pemerintah setiap bulannya. Iuran adalah elemen penting untuk keberhasilan program JKN. Bagi peserta mandiri, iuran bulanan ditentukan berdasarkan manfaat pelayanan yang dipilih dan iuran dapat dibayarkan langsung oleh peserta atau pihak lain atas nama peserta. Apabila peserta memilih layanan perawatan kelas I, maka iuran yang harus dibayar setiap bulan adalah Rp 150.000 per orang. Untuk peserta yang memilih layanan perawatan kelas II, ditetapkan iuran sebesar Rp 100.000 per orang, sedangkan untuk kelas III sebesar Rp 42.000 per orang. Sejak 1 Januari 2021, peserta mandiri yang memilih layanan perawatan kelas III memperoleh bantuan iuran dari pemerintah setiap bulan sebesar Rp 7.000 per peserta, dengan demikian peserta hanya diwajibkan membayar iuran Rp 35.000 setiap bulan.

Jumlah peserta JKN terus meningkat setiap tahun, hal ini menunjukkan bahwa program JKN semakin dibutuhkan oleh masyarakat. Pada tahun 2026, penduduk Indonesia

telah mencapai 287.198,4 ribu jiwa. Berdasarkan data BPJS Kesehatan per 28 Februari 2026, penduduk Indonesia yang terdaftar sebagai peserta program JKN telah mencapai 284.673.982 jiwa atau sekitar 99,12 % dari total penduduk. Capaian tersebut menunjukkan bahwa cakupan kepesertaan JKN telah memenuhi target UHC sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2023 yaitu sebesar 98%. Dari jumlah tersebut sebanyak 121.427.419 jiwa atau 42,7% dari keseluruhan peserta yang terdaftar program JKN merupakan peserta PBI dan sebanyak 163.246.563 jiwa atau 57,3% merupakan peserta non PBI. Pada peserta non PBI, segmen PBPU menjadi segmen dengan peserta terbanyak keempat dengan jumlah 32.119.379 jiwa atau sebesar 11,7% dari total peserta JKN. Sementara itu, di Provinsi Jambi tercatat bahwa 30,81% dari total penduduk yang terdaftar program JKN merupakan peserta PBI dan 26,85% tercatat sebagai peserta non PBI.

Menurut data BPJS Kesehatan Cabang Jambi, jumlah penduduk Kota Jambi yang terdaftar sebagai peserta JKN hingga bulan November 2025 telah mencapai 764.702 jiwa atau sekitar 98,5% dari total penduduk (642,26 ribu jiwa). Per tanggal 1 Januari 2026, cakupan kepesertaan JKN di Kota Jambi mengalami peningkatan yang telah menyentuh angka 99,81% dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 81,69%. Sebanyak 405.524 jiwa atau 53,03% terdaftar sebagai peserta PBI. Sekitar 66,19% atau 359.178 jiwa penduduk Kota Jambi terdaftar sebagai peserta Non-PBI yang terdiri dari 175.212 peserta segmen Pekerja Penerima Upah (PPU), 163.945 peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan 20.021 peserta dari segmen Bukan Pekerja.

Dari lima wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Jambi, Kota Jambi menjadi wilayah kerja yang memiliki peserta mandiri menunggak tertinggi pada tahun 2025 dengan jumlah 129.006 jiwa. Tunggakan iuran peserta mandiri di Kota Jambi telah mencapai Rp 77.236.056.599 per Mei 2025. 11 kecamatan yang ada di Kota Jambi, tercatat bahwa Kecamatan Alam Barajo menjadi kecamatan dengan jumlah tunggakan iuran terbanyak yaitu sebesar Rp 14.928.283.778 dengan jumlah peserta yang menunggak sebanyak 22.692 jiwa. Disusul oleh Kecamatan Paal Merah dengan peserta menunggak sebanyak 23.332 jiwa.

Peningkatan jumlah Peserta JKN Mandiri khususnya Kota Jambi tidak sebanding dengan tingkat kemauan dan kemampuannya membayar iuran. Salah satu hal yang dapat membantu peserta JKN yang membutuhkan layanan kesehatan untuk terus menerima manfaat adalah kemauan dan kemampuan mereka untuk membayar iuran. Namun, keberhasilan program JKN ini masih terhambat oleh ketidakkonsistenan peserta mandiri dalam membayar iuran. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka akan berdampak pada keberlanjutan pembiayaan program JKN sebagai salah satu upaya dalam mencapai UHC. Selain ini, kurangnya kemauan dan

ketidakpatuhan dalam pembayaran iuran juga dapat menghambat akses peserta terhadap pelayanan kesehatan serta meningkatkan beban pembiayaan kesehatan baik bagi individu maupun negara.

Kemauan membayar (*willingness to pay*) atau bisa disingkat dengan WTP adalah kesediaan individu dalam mengeluarkan atau membayarkan sejumlah uang untuk mendapatkan suatu produk atau layanan. Sedangkan Kemampuan membayar (*ability to pay*) adalah kemampuan individu untuk membayar jasa atas pelayanan kesehatan yang diperoleh dari fasilitas kesehatan sesuai dengan pendapatan yang dianggap ideal.

Rendahnya kemauan dan kemampuan Peserta Mandiri untuk membayar iuran disebabkan oleh berbagai alasan diantaranya merasa belum membutuhkan layanan kesehatan, tidak merasa sakit, atau belum memiliki uang, dan lain-lain (Rahmatillah et al., 2025). Menurut Icek Ajzen, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi niat individu untuk melakukan suatu perilaku salah satunya membayar iuran bulanan JKN yaitu *attitude toward behavior* (pendidikan, pengetahuan, riwayat penyakit katastropik, dan kualitas layanan), *subjective norm* (dukungan keluarga, pengaruh lingkungan), dan *perceived behavior control* (pendapatan).

Penelitian yang dilakukan oleh (Khumaira et al., 2024), menunjukkan bahwa kemampuan membayar (64,7%) lebih kecil dari kemauan membayar Iuran BPJS kelas III pada pedagang Kelurahan Tuntunagn II cukup tinggi. (92,2%). Hasil uji *chi square* pada studi ini menunjukkan bahwa, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan memiliki hubungan yang signifikan dengan ATP. Sedangkan jumlah anggota keluarga tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan ATP. Namun, ketiga faktor tersebut tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan dengan WTP.

Menurut (Hildayanti et al., 2021), kemauan untuk membayar (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) iuran BPJS Kesehatan pada peserta mandiri di Kecamatan Takabonerate dipengaruhi oleh pendapatan per bulan ($p = 0,000 < \alpha$), jumlah anggota keluarga ($p = 0,000 < \alpha$), persepsi terhadap mutu pelayanan kesehatan ($p = 0,000 < \alpha$), dan riwayat penyakit katastropik ($p = 0,000 < \alpha$). Penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan membayar (ATP) peserta mandiri (68,1%) lebih kecil dari kemauan membayar (WTP) Iuran BPJS Kesehatan. (92,2%).

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Iqbal et al., 2023), menunjukkan bahwa jumlah anggota keluarga, pengetahuan, riwayat penyakit katastropik, dan mutu pelayanan kesehatan memiliki hubungan yang signifikan dengan kemauan membayar iuran para pekerja sektor informal di Kota Jakarta Timur tahun 2023. Layanan kesehatan yang baik dapat

meningkatkan loyalitas peserta untuk terus mengakses layanan kesehatan, hal ini tentu berdampak pada kemauan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan.

Berdasarkan hasil survey awal dan observasi yang dilakukan kepada 10 orang melalui wawancara, ditemukan bahwa dari 6 dari 10 orang bersedia dan patuh membayar iuran sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Sementara itu, 4 orang tidak bersedia membayar dan sering terlambat melakukan pembayaran iuran disebabkan oleh pendapatan yang tidak menentu setiap bulan. Akibatnya mereka lebih memilih menggunakan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan dasar dibandingkan membayar iuran JKN. Selain masalah pendapatan, ada beberapa hal yang menyebabkan peserta mandiri tidak mau atau bersedia membayar serta sering terlambat melakukan pembayaran diantaranya tidak mengetahui batas tanggal pembayaran yang telah ditetapkan, merasa dibedakan dari pasien umum, dan merasa tidak membutuhkan perawatan kesehatan dalam waktu dekat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan rancangan observasional dan pendekatan *cross sectional*, yaitu pengukuran variabel independen dan dependen dilakukan pada waktu yang sama. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, dengan populasi seluruh penduduk yang tercatat sebanyak 117.707 jiwa. Sampel penelitian ditentukan menggunakan rumus Lemeshow dan diperoleh 96 responden, kemudian ditambah untuk mengantisipasi *drop out* sehingga menjadi 106 responden. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *cluster sampling (area sampling)* pada tujuh kelurahan di Kecamatan Alam Barajo dengan pembagian sampel secara proporsional sesuai wilayah kelurahan. Responden merupakan peserta JKN mandiri yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi penelitian.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang memuat variabel pendidikan, pengetahuan, pendapatan, riwayat penyakit katastropik, kualitas layanan, *Willingness to Pay*, dan *Ability to Pay*. Data yang diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisis secara bivariat menggunakan uji *Chi-Square* dengan tingkat kemaknaan $\alpha = 0,05$ dan tingkat kepercayaan 95% untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan *Willingness to Pay* dan *Ability to Pay* iuran JKN. Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel silang (*cross tabulation*) dan diinterpretasikan berdasarkan nilai *p-value*, dengan *p-value* < 0,05 menunjukkan adanya hubungan yang bermakna secara statistik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Pendidikan dengan Willingness to Pay Iuran JKN

Tabel 1. Hasil Analisis Bivariat Pendidikan dengan Willingness to Pay Iuran JKN pada Peserta Mandiri di Kecamatan Alam Barajo Tahun 2026

Tingkat Pendidikan	Willingness to Pay				Jumlah		PR 95% CI	P- Value
	Tidak Mau	%	Mau	%	N	%		
Rendah	15	45,5%	18	54,5%	33	100%	1,659 (0,978 – 2,814)	0,108
Tinggi	20	27,4%	53	72,6%	73	100%		
Jumlah	35	33,0%	71	67,0%	106	100%		

Sumber: Data Primer Terolah, 2026

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa ada sebanyak 18 responden (54,5%) dengan tingkat pendidikan rendah mau membayar iuran JKN. Sedangkan diantara peserta mandiri dengan tingkat pendidikan tinggi, ada 53 responden (72,6%) yang mau membayar iuran JKN. Uji hipotesis yang digunakan adalah *Chi-Square*, dengan *p-value* sebesar 0,108. Artinya, secara statistik tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan dengan Willingness to Pay iuran Jaminan Kesehatan Nasional. Parameter kekuatan hubungan yang digunakan adalah PR, yaitu sebesar 1,659 dengan nilai 95% CI : 0,978 – 2,814. Artinya, pendidikan bukan merupakan determinan Willingness to Pay iuran peserta mandiri di Kecamatan Alam Barajo.

Hubungan Pengetahuan dengan Willingness to Pay Iuran JKN

Tabel 2. Hasil Analisis Bivariat Pengetahuan dengan Willingness to Pay Iuran JKN pada Peserta Mandiri di Kecamatan Alam Barajo Tahun 2026

Tingkat Pengetahuan	Willingness to Pay				Jumlah		PR 95% CI	P- Value
	Tidak Mau	%	Mau	%	N	%		
Kurang Baik	24	55,8%	19	44,2%	43	100%	3,197 (1,756 – 5,820)	0,000
Baik	11	17,5%	52	82,5%	63	100%		
Jumlah	35	33,0%	71	67,0%	106	100%		

Sumber: Data Primer Terolah, 2026

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa ada sebanyak 19 responden (44,2%) yang memiliki pengetahuan kurang baik tentang JKN mau membayar iuran JKN. Sedangkan diantara peserta mandiri yang memiliki pengetahuan baik tentang JKN, ada 52 responden (82,5%) yang mau membayar iuran JKN. Uji hipotesis yang digunakan adalah *Chi-Square*, dengan *p-value* sebesar 0,000. Artinya, secara statistik terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan Willingness to Pay iuran Jaminan Kesehatan Nasional. Parameter kekuatan hubungan yang digunakan adalah PR, yaitu sebesar 3,197 dengan nilai 95% CI: 1,756 – 5,820. Artinya, peserta mandiri dengan pengetahuan kurang baik mempunyai kemungkinan

3,19 kali untuk tidak mau membayar iuran JKN dibandingkan dengan peserta mandiri yang memiliki pengetahuan baik tentang JKN.

Hubungan Pendapatan dengan *Willingness to Pay* Iuran JKN

Tabel 3. Hasil Analisis Bivariat Pendapatan dengan *Willingness to Pay* Iuran JKN pada Peserta Mandiri di Kecamatan Alam Barajo Tahun 2026

Tingkat Pendapatan	<i>Willingness to Pay</i>				Jumlah		PR 95% CI	P- Value
	Tidak Mau	%	Mau	%	N	%		
Rendah	24	44,4%	30	55,6%	54	100%	2,101 (1,149 – 3,842)	0,019
Tinggi	11	21,2%	41	78,8%	52	100%		
Jumlah	35	33,0%	71	67,0%	106	100%		

Sumber : Data Primer Terolah, 2026

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat ada sebanyak 30 responden (55,5%) yang memiliki pendapatan yang rendah mau membayar iuran JKN. Sedangkan diantara peserta mandiri yang memiliki pendapatan tinggi, ada 41 responden (78,8%) yang mau membayar iuran JKN. Uji hipotesis yang digunakan adalah *Chi-Square*, dengan *p-value* sebesar 0,019. Artinya, secara statistik terdapat hubungan yang signifikan antara pendapatan dengan *Willingness to Pay* iuran Jaminan Kesehatan Nasional. Parameter kekuatan hubungan yang digunakan adalah PR, yaitu sebesar 2,101 dengan nilai 95% CI: 1,149 – 3,842. Artinya, peserta mandiri dengan pendapatan rendah mempunyai kemungkinan 2,10 kali untuk tidak mau membayar iuran JKN dibandingkan dengan peserta mandiri yang memiliki pendapatan tinggi.

Hubungan Riwayat Penyakit Katastropik dengan *Willingness to Pay* Iuran JKN

Tabel 4 Hasil Analisis Bivariat Riwayat Penyakit Katastropik dengan *Willingness to Pay* Iuran JKN pada Peserta Mandiri

Riwayat Penyakit Katastropik	<i>Willingness to Pay</i>				Jumlah		PR 95% CI	P- Value
	Tidak Mau	%	Mau	%	N	%		
Ada	5	14,3%	30	85,7%	35	100%	0,338 (0,144 – 0,796)	0,008
Tidak Ada	30	42,3%	41	57,7%	71	100%		
Jumlah	35	33,0%	71	67,0%	106	100%		

Sumber : Data Primer Terolah, 2026

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa ada sebanyak 30 responden (85,7%) yang memiliki riwayat penyakit katastropik mau membayar iuran JKN. Sedangkan diantara peserta mandiri yang tidak memiliki riwayat penyakit katastropik, ada 41 responden (57,5%) yang mau membayar iuran JKN. Uji hipotesis yang digunakan adalah *Chi-Square*, dengan *p-value* sebesar 0,008. Artinya, secara statistik terdapat hubungan yang signifikan antara riwayat penyakit katastropik dengan *Willingness to Pay* iuran Jaminan Kesehatan Nasional. Parameter kekuatan hubungan yang digunakan adalah PR, yaitu sebesar 0,338 dengan nilai 95% CI: 0,144 – 0,796. Artinya, peserta mandiri yang tidak penyakit katastropik mempunyai kemungkinan

0,33 kali untuk tidak mau membayar iuran JKN dibandingkan dengan peserta mandiri yang memiliki riwayat penyakit katastropik.

Hubungan Kualitas Layanan dengan Willingness to Pay Iuran JKN

Tabel 5. Hasil Analisis Bivariat Kualitas Layanan dengan Willingness to Pay Iuran JKN pada Peserta Mandiri di Kecamatan Alam Barajo

Kualitas Layanan	Willingness to Pay				Jumlah		PR 95% CI	P- Value
	Tidak Mau	%	Mau	%	N	%		
Kurang Baik	25	55,6%	20	44,4%	45	100%	3,389 (1,816 – 6,325)	0,000
Baik	10	16,4%	51	83,6%	61	100%		
Jumlah	35	33,0%	71	67,0%	106	100%		

Sumber : Data Primer Terolah, 2026

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa ada sebanyak 20 responden (44,4%) yang memiliki persepsi kualitas layanan yang kurang baik mau membayar iuran JKN. Sedangkan diantara peserta mandiri yang memiliki persepsi kualitas layanan baik, ada 51 responden (83,6%) yang mau membayar iuran. Uji hipotesis yang digunakan adalah *Chi-Square*, dengan *p-value* sebesar 0,000. Artinya, secara statistik terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas layanan dengan Willingness to Pay iuran Jaminan Kesehatan Nasional. Parameter kekuatan hubungan yang digunakan adalah *Prevalence Ratio* (PR), yaitu sebesar 3,389 dengan nilai 95% CI: 1,816 – 6,325. Artinya, peserta mandiri dengan persepsi kualitas layanan kurang baik mempunyai kemungkinan 3,38 kali untuk tidak mau membayar iuran JKN dibandingkan dengan peserta mandiri yang memiliki persepsi kualitas layanan baik.

Hubungan Pendidikan dengan Ability to Pay Iuran JKN

Tabel 6. Hasil Analisis Bivariat Tingkat Pendidikan dengan Ability to Pay Iuran JKN pada Peserta Mandiri di Kecamatan Alam Barajo Tahun 2026

Tingkat Pendidikan	Ability to Pay				Jumlah		PR 95% CI	P- Value
	Tidak Mampu	%	Mampu	%	N	%		
Rendah	24	72,7%	9	23,3%	33	100%	1,966 (1,365 – 2,833)	0,001
Tinggi	27	37,0%	46	63,0%	73	100%		
Jumlah	51	48,1%	55	51,9%	106	100%		

Sumber : Data Primer Terolah, 2026

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa ada sebanyak 9 responden (23,3%) dengan tingkat pendidikan rendah mampu membayar iuran JKN. Sedangkan diantara peserta mandiri dengan tingkat pendidikan tinggi, ada 46 responden (63,0%) yang mampu membayar iuran JKN. Uji hipotesis yang digunakan adalah *Chi-Square*, dengan *p-value* sebesar 0,001. Artinya, secara statistik terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan dengan Ability to Pay iuran Jaminan Kesehatan Nasional. Parameter kekuatan hubungan yang digunakan adalah PR, yaitu sebesar 1,966 dengan nilai 95% CI: 1,365 – 2,833. Artinya, peserta mandiri

dengan tingkat pendidikan rendah mempunyai kemungkinan 1,96 kali untuk tidak mampu membayar iuran JKN dibandingkan dengan peserta mandiri yang berpendidikan tinggi.

Hubungan Pendapatan dengan *Ability to Pay* Iuran JKN

Tabel 7. Hasil Analisis Bivariat Pendapatan dengan *Ability to Pay* Iuran JKN pada Peserta Mandiri di Kecamatan Alam Barajo Tahun 2026

Tingkat Pendapatan	<i>Ability to Pay</i>				Jumlah		PR 95% CI	P- Value
	Tidak Mampu	%	Mampu	%	N	%		
Rendah	41	75,0%	13	24,1%	54	100%	3,948 (2,217 – 7,030)	0,000
Tinggi	10	19,2%	42	80,8%	52	100%		
Jumlah	51	48,1%	55	51,9%	106	100%		

Sumber : Data Primer Terolah, 2026

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa ada sebanyak 13 responden (24,1%) yang memiliki pendapatan yang rendah mampu membayar iuran JKN. Sedangkan diantara peserta mandiri yang memiliki pendapatan tinggi, ada 42 responden (80,8%) yang mampu membayar iuran. Uji hipotesis yang digunakan adalah *Chi-Square*, dengan *p-value* sebesar 0,000. Artinya, secara statistik terdapat hubungan yang signifikan antara pendapatan dengan *Ability to Pay* iuran Jaminan Kesehatan Nasional. Parameter kekuatan hubungan yang digunakan adalah *Prevalence Ratio* (PR), yaitu sebesar 3,948 dengan nilai 95% CI: 2,217 – 7,030. Artinya, peserta mandiri dengan pendapatan rendah mempunyai kemungkinan 3,94 kali untuk tidak mampu membayar iuran JKN dibandingkan dengan peserta mandiri yang memiliki pendapatan tinggi.

Pembahasan

Hubungan Pendidikan dengan *Willingness to Pay* Iuran Jaminan Kesehatan Nasional pada Peserta Mandiri di Kecamatan Alam Barajo

Hasil analisis bivariat antara pendidikan dengan *Willingness to Pay* diperoleh *p-value* sebesar 0,108 yang berarti tidak ada hubungan pendidikan dengan *Willingness to Pay* iuran Jaminan Kesehatan Nasional pada peserta mandiri di Kecamatan Alam Barajo. Hasil perhitungan *risk estimate* diperoleh nilai PR sebesar 1,659 dengan 95% CI: 0,978 – 2,814. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mandiri yang memiliki pendidikan rendah mau membayar iuran yaitu sebanyak 15 responden (45,5%), sedangkan pada peserta mandiri dengan pendidikan tinggi sebagian besar mau membayar iuran JKN sebanyak 53 responden (72,6%). Temuan ini menunjukkan bahwa kemauan peserta mandiri untuk membayar iuran JKN tidak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dimilikinya. Baik peserta mandiri yang berpendidikan tinggi maupun yang berpendidikan rendah memiliki kemungkinan yang sama untuk mau atau tidak mau membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Istamayu et al., 2022), yang menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan antara pendidikan dengan kemauan membayar iuran peserta JKN mandiri dengan *p-value* sebesar 1,108. Penelitian tersebut mengatakan, sebagian besar responden memiliki pendidikan tinggi. Namun, masih ditemukan beberapa responden berpendidikan tinggi yang tidak mengetahui informasi mengenai JKN dibandingkan responden berpendidikan rendah yang rata-rata memiliki pengetahuan yang baik mengenai JKN. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal tidak selalu menjadi faktor utama yang menentukan kesediaan peserta untuk membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional.

Penelitian lain yang dilakukan (Khumaira et al., 2024), juga menemukan tidak adanya hubungan antara pendidikan dengan kemauan membayar iuran BPJS Kesehatan Kelas III pada pedagang dengan *p-value* sebesar 0,698. Penelitian tersebut menyatakan bahwa pendidikan tinggi tidak selalu membuat orang lebih mau membayar iuran untuk layanan kesehatan, karena mereka lebih banyak memikirkan resikonya daripada manfaat yang diterima dari program JKN.¹⁷

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Haq et al., 2022), juga tidak menunjukkan adanya hubungan pendidikan dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan pada pasien peserta mandiri dengan *p-value* sebesar 0,173. Hal ini disebabkan karena pasien yang memiliki pendidikan yang rendah mempunyai motivasi yang tinggi dalam menggunakan BPJS Kesehatan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peserta dengan pendidikan tinggi maupun pendidikan rendah sama-sama memiliki kepatuhan dalam membayar iuran. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan bukan satu-satunya faktor yang menentukan perilaku peserta dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran JKN.

Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Noerdjoedianto et al., 2023), menemukan adanya hubungan antara tingkat pendidikan dan WTP dengan *p-value* sebesar 0,009. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pendidikan merupakan salah satu determinan kemauan membayar iuran JKN. Perbedaan hasil ini dapat disebabkan oleh karakteristik responden dan kondisi wilayah penelitian, sehingga tingkat pendidikan dapat memberikan pengaruh yang berbeda terhadap kemauan membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional.

Hubungan Pengetahuan dengan *Willingness to Pay* Iuran Jaminan Kesehatan Nasional pada Peserta Mandiri di Kecamatan Alam Barajo

Hasil analisis bivariat antara pengetahuan dengan *Willingness to Pay* diperoleh *p-value* sebesar 0,000 yang berarti ada hubungan pengetahuan dengan *Willingness to Pay* iuran

Jaminan Kesehatan Nasional pada peserta mandiri di Kecamatan Alam Barajo. Hasil perhitungan *risk estimate* diperoleh nilai PR sebesar 3,197 dengan 95% CI: 1,756 – 5,820. Hal ini menunjukkan bahwa responden dengan pengetahuan kurang baik memiliki kemungkinan 3,19 kali untuk tidak mau membayar iuran dibandingkan dengan responden yang memiliki pengetahuan baik tentang JKN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mandiri yang memiliki pengetahuan kurang baik tentang JKN tidak mau membayar iuran yaitu sebanyak 24 responden (55,8%), sedangkan pada peserta mandiri dengan pengetahuan baik sebagian besar mau membayar iuran JKN yaitu sebanyak 52 responden (82,5%). Temuan ini menunjukkan bahwa pengetahuan merupakan determinan *Willingness to Pay* iuran Jaminan Kesehatan Nasional pada peserta mandiri.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Istamayu et al., 2022), yang menunjukkan adanya hubungan antara pengetahuan dengan kemauan membayar iuran pada peserta mandiri dengan *p-value* sebesar 0,000. Responden yang memiliki pengetahuan baik lebih banyak menyatakan bersedia membayar iuran dibandingkan dengan responden yang memiliki pengetahuan kurang baik. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pengetahuan peserta JKN mandiri yang kurang baik disebabkan oleh banyaknya responden yang tidak mendapatkan informasi mengenai BPJS Kesehatan dibandingkan responden yang memiliki pengetahuan baik. Semakin sering informasi diberikan kepada peserta mandiri, maka akan semakin baik dan dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan peserta mandiri.

Penelitian lain yang dilakukan (Iqbal et al., 2023), juga menemukan adanya hubungan antara pengetahuan dengan kemauan membayar iuran pada pekerja sektor informal tahun 2023 dengan *p-value* sebesar 0,000. Penelitian ini menunjukkan bahwa responden dengan pengetahuan tinggi cenderung menunjukkan kemauan membayar yang lebih tinggi daripada responden yang memiliki pengetahuan rendah. Pengetahuan memiliki hubungan yang erat dengan kemauan membayar iuran BPJS, karena dengan pengetahuan akan manfaat yang didapat dari membayar iuran tepat waktu akan mempengaruhi persepsi seseorang terhadap biaya pelayanan kesehatan.

Selanjutnya, penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh (Tuan & Dodo, 2023), yang menunjukkan bahwa pengetahuan JKN berhubungan dengan kemauan membayar pada peserta PBPU dengan *p-value* sebesar 0,000. Responden lebih banyak memiliki pengetahuan yang baik tentang JKN karena membaca dan mendengar informasi melalui media elektronik dan media massa. Salah satu faktor yang menghambat kesinambungan pembayaran iuran pada peserta PBPU adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pembayaran iuran dan konsekuensi dari ketidakpatuhan membayar iuran.

Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan (Masri et al., 2022), menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan WTP pada peserta mandiri dengan *p-value* sebesar 0,155. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa tingkat pengetahuan responden belum tentu berkaitan dengan kemauan mereka untuk membayar iuran dan peserta mandiri yang memiliki pengetahuan cukup baik cenderung mendapatkan informasi, pengalaman, dan rekomendasi yang negatif sehingga peserta hanya sekedar mengetahui saja.

Hubungan Pendapatan dengan Willingness to Pay Iuran Jaminan Kesehatan Nasional pada Peserta Mandiri di Kecamatan Alam Barajo

Hasil analisis bivariat antara pendapatan dengan *Willingness to Pay* diperoleh *p-value* sebesar 0,019 yang berarti ada hubungan pendapatan dengan *Willingness to Pay* iuran JKN pada peserta mandiri di Kecamatan Alam Barajo. Hasil perhitungan *risk estimate* diperoleh nilai *Prevalence Ratio* sebesar 2,101 dengan 95% CI: 1,149 – 3,842. Artinya, responden dengan pendapatan rendah memiliki kemungkinan 2,10 kali untuk tidak mau membayar iuran dibandingkan dengan responden yang memiliki pendapatan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mandiri dengan pendapatan tinggi menyatakan mau membayar iuran JKN yaitu sebanyak 41 responden (78,8%). Sementara itu, pada peserta mandiri yang memiliki pendapat rendah sebanyak 24 responden (44,4%) menyatakan tidak mau membayar iuran. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan peserta, semakin tinggi pula kemauan peserta mandiri untuk membayar iuran JKN.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Prakoso, 2021), yang menunjukkan adanya hubungan antara pendapatan dengan *Willingness to Pay* premi BPJS Kesehatan pada pekerja sektor informal dengan *p-value* sebesar 0,005. Penelitian tersebut menyatakan bahwa pekerja sektor informal dengan pendapatan tinggi memiliki kemungkinan 2,02 lebih tinggi untuk bersedia membayar premi dibandingkan pekerja informal yang memiliki pendapatan rendah. Pendapatan rendah dan tidak pasti setiap bulan dapat menurunkan kesediaan masyarakat untuk membayar premi BPJS Kesehatan.

Penelitian lain yang dilakukan (Noerdjoedianto et al., 2023), menunjukkan bahwa pendapatan merupakan determinan kemauan membayar iuran JKN peserta mandiri. Hasil penelitian tersebut diperoleh *p-value* sebesar 0,023, yang artinya terdapat hubungan signifikan antara pendapatan dan kemauan membayar iuran JKN. Hasil tersebut juga sejalan dengan (Nurlia et al., 2021), menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara pendapatan dan WTP iuran BPJS Kesehatan pada peserta mandiri di Kabupaten Jember, Jawa Timur dengan *p-value* sebesar 0,001.

Selanjutnya, penelitian ini sejalan dengan (Istamayu et al., 2022), yang menunjukkan adanya hubungan antara pendapatan dengan kemauan membayar iuran JKN pada peserta mandiri dengan *p-value* sebesar 0,000. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan maka akan mempengaruhi kemauan membayar responden sebanyak 7,699 kali dibandingkan yang memiliki pendapatan rendah.

Namun, temuan ini tidak sejalan dengan penelitian (Khumaira et al., 2024), yang menyatakan tidak adanya antara pendapatan dengan kemauan membayar iuran BPJS kelas III pada pedagang di Kelurahan Tuntungan II dengan *p-value* sebesar 0,552. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pedagang dengan pendapatan rendah atau dibawah UMR Kota Medan memiliki kemauan yang lebih besar untuk membayar iuran BPJS kelas III dibandingkan dengan pedagang yang memiliki pendapatan tinggi. Pedagang dengan pendapatan dibawah UMR menunjukkan kapasitas dan motivasi yang lebih tinggi untuk membiayai iuran BPJS Kesehatan.

Hubungan Riwayat Penyakit Katastropik dengan *Willingness to Pay* Iuran Jaminan Kesehatan Nasional pada Peserta Mandiri di Kecamatan Alam Barajo

Hasil analisis bivariat antara riwayat penyakit katastrofik dengan *Willingness to Pay* diperoleh *p-value* sebesar 0,008 yang berarti ada hubungan riwayat penyakit katastrofik dengan *Willingness to Pay* iuran JKN pada peserta mandiri di Kecamatan Alam Barajo. Temuan ini menunjukkan bahwa riwayat penyakit katastrofik merupakan determinan kemauan membayar iuran JKN. Hasil perhitungan *risk estimate* diperoleh nilai *Prevalence Ratio* (PR) sebesar 0,338 dengan 95% CI: 0,144 – 0,796. Artinya, responden yang tidak memiliki Riwayat penyakit katastrofik mempunyai kemungkinan 0,33 kali untuk tidak mau membayar iuran dibandingkan responden dengan riwayat penyakit katastrofik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mandiri dengan riwayat penyakit katastrofik menyatakan mau membayar iuran JKN yaitu sebanyak 30 responden (85,7%). Sementara itu, pada peserta mandiri yang tidak memiliki riwayat penyakit katastrofik sebagian besar menyatakan tidak mau membayar iuran JKN yaitu sebanyak 30 responden (42,3%).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Iqbal et al., 2023), yang menunjukkan adanya pengaruh riwayat penyakit katastrofik terhadap kemauan membayar iuran para pekerja sektor informal dengan *p-value* sebesar 0,000. Penelitian ini menunjukkan bahwa responden dengan riwayat penyakit katastrofik cenderung memiliki kemauan membayar lebih tinggi dibandingkan responden yang tidak memiliki riwayat penyakit. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa peserta yang mempunyai riwayat penyakit katastrofik tertentu akan bersedia untuk membayar iuran untuk tetap dapat menikmati

pelayanan yang di berikan BPJS Kesehatan, hal tersebut merupakan pilihan terbaik agar terhindar dari pembengkakan biaya pengobatan.

Penelitian lain yang dilakukan (Witati & Putri, 2020), juga menunjukkan adanya pengaruh antara riwayat penyakit katastropik dengan kemauan membayar iuran BPJS Kesehatan pada pekerja sektor informal dengan *p-value* sebesar 0,0024. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa responden dengan riwayat penyakit katastropik cenderung memiliki kemauan membayar karena pembayaran iuran dapat membantu mengurangi beban biaya pengobatan dan risiko biaya kesehatan yang sulit diprediksi. Sebaliknya, responden yang tidak memiliki riwayat penyakit katastropik cenderung memiliki kemauan membayar yang lebih rendah karena merasa memiliki risiko sakit yang lebih kecil.

Selanjutnya, penelitian ini sejalan dengan penelitian (Barus & Hasibuan, 2026), yang menunjukkan adanya hubungan antara riwayat penyakit katastropik dengan kemauan membayar iuran JKN dengan *p-value* sebesar 0,022. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa peserta dengan riwayat penyakit katastropik bersedia membayar JKN karena menyadari manfaatnya dalam meringankan beban biaya pengobatan. Pengalaman mereka dalam memanfaatkan layanan JKN memperkuat kesadaran akan pentingnya menjadi peserta aktif. Sebaliknya, peserta yang tidak memiliki riwayat penyakit katastropik cenderung enggan membayar karena merasa sehat dan jarang memerlukan pelayanan kesehatan.

Namun, temuan ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tuan & Dodo, 2023), yang menunjukkan tidak adanya hubungan riwayat penyakit katastropik dengan kemauan membayar pada peserta mandiri di Kelurahan Bello, Kota Kupang dengan *p-value* sebesar 0,661. Penelitian tersebut menemukan bahwa masyarakat yang memiliki dan tidak memiliki riwayat penyakit katastropik sama-sama cenderung untuk tidak mau membayar iuran. Perbedaan hasil penelitian ini dapat disebabkan oleh perbedaan karakteristik, responden, dan lokasi penelitian.

Hubungan Kualitas Layanan dengan Willingness to Pay Iuran Jaminan Kesehatan Nasional pada Peserta Mandiri di Kecamatan Alam Barajo

Hasil analisis bivariat antara kualitas pelayanan dengan *Willingness to Pay* diperoleh *p-value* sebesar 0,000 yang berarti ada kualitas pelayanan dengan *Willingness to Pay* iuran JKN pada peserta mandiri di Kecamatan Alam Barajo. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan merupakan determinan kemauan membayar iuran JKN. Hasil perhitungan *risk estimate* diperoleh nilai *Prevalence Ratio* (PR) sebesar 3,389 dengan 95% CI: 1,816 – 6,325. Artinya, responden dengan persepsi kualitas pelayanan kurang baik mempunyai kemungkinan 3,389 kali untuk tidak mau membayar iuran dibandingkan dengan responden memiliki persepsi

kualitas pelayanan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mandiri dengan persepsi kualitas pelayanan baik menyatakan mau membayar iuran JKN yaitu sebanyak 51 responden (83,6%). Sementara itu, pada peserta mandiri yang memiliki persepsi kualitas pelayanan kurang baik, sebanyak 25 responden (55,6%) menyatakan tidak mau membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Salman et al., 2025), yang menunjukkan adanya hubungan antara persepsi terhadap kualitas pelayanan dengan kemauan membayar iuran JKN pada peserta mandiri *p-value* sebesar 0,000. Persepsi terhadap pelayanan kesehatan dalam penelitian tersebut mengacu pada penilaian subjectif peserta terhadap kualitas pelayanan meliputi kecepatan, ketepatan, keramahan petugas, dan ketersediaan fasilitas. Peneliti tersebut menemukan bahwa peserta yang memiliki persepsi positif terhadap pelayanan kesehatan cenderung memiliki kemauan membayar yang lebih tinggi karena mereka menilai biaya yang dikeluarkan untuk membayar iuran sebanding dengan manfaat pelayanan yang diterima.⁵⁰

Penelitian lain yang dilakukan (Iqbal et al., 2023), juga menemukan adanya pengaruh antara mutu pelayanan kesehatan terhadap kemauan membayar iuran pada pekerja sektor informal dengan *p-value* sebesar 0,000. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa kualitas pelayanan kesehatan yang baik akan meningkatkan kemauan peserta membayar iuran karena dengan pelayanan kesehatan yang baik akan meningkatkan loyalitas peserta untuk terus menggunakan layanan kesehatan dan tentu saja berdampak pada kemauan membayar iuran BPJS.

Selanjutnya, penelitian ini sejalan dengan penelitian (Barus & Hasibuan, 2026), yang menunjukkan adanya hubungan antara persepsi mutu pelayanan dengan kemauan membayar iuran pada peserta mandiri dengan *p-value* sebesar 0,003. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa semakin baik mutu pelayanan yang dirasakan oleh peserta, maka semakin besar kemauan mereka untuk membayar iuran JKN. Sebaliknya, jika peserta menilai kualitas pelayanan kurang baik, maka kemauan membayar cenderung menurun.⁴⁹

Namun, temuan ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tuan & Dodo, 2023), yang menunjukkan tidak adanya hubungan antara persepsi tentang mutu pelayanan terhadap kemauan membayar pada peserta PBPU di Kelurahan Bello, Kota Kupang dengan *p-value* sebesar 0,0058. Baik responden yang memiliki persepsi mutu pelayanan baik maupun persepsi pelayanan kurang baik sama-sama cenderung tidak mau membayar. Penelitian tersebut menemukan bahwa pelayanan kesehatan yang diterima responden di fasilitas kesehatan tidak semuanya bersifat baik, antara lain masih ditemukan pelayanan yang tergesa-

gesa karena keadaan mendesak dengan jumlah antrean yang banyak. Perbedaan karakteristik responden, kondisi fasilitas kesehatan, pengalaman pelayanan, serta ketersediaan pilihan fasilitas pelayanan dapat menjadi salah satu hal yang membedakan hasil penelitian.

Hubungan Pendidikan dengan *Ability to Pay* Iuran Jaminan Kesehatan Nasional pada Peserta Mandiri di Kecamatan Alam Barajo

Hasil analisis bivariat antara pendidikan dengan *Ability to Pay* diperoleh *p-value* sebesar 0,001 yang berarti ada hubungan pendidikan dengan *Ability to Pay* iuran JKN pada peserta mandiri di Kecamatan Alam Barajo. Temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan determinan kemampuan membayar iuran JKN. Hasil perhitungan *risk estimate* diperoleh nilai PR sebesar 1,996 dengan 95% CI: 1,365 – 2,833. Artinya, responden yang memiliki pendidikan rendah mempunyai kemungkinan 1,96 kali untuk tidak mau membayar iuran dibandingkan responden dengan pendidikan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mandiri dengan pendidikan rendah tidak mau membayar iuran JKN yaitu sebanyak 24 responden (72,7%). Sementara itu, pada peserta mandiri yang memiliki pendidikan tinggi sebagian besar mampu membayar iuran JKN yaitu sebanyak 46 responden (63,0%).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Khumaira et al., 2024) menunjukkan bahwa adanya hubungan antara pendidikan dengan kemampuan membayar iuran BPJS Kesehatan Kelas III pada dengan *p-value* sebesar 0,005. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan kemampuan pedagang dalam membayar iuran BPJS Kesehatan.

Hubungan Pendapatan dengan *Ability to Pay* Iuran Jaminan Kesehatan Nasional pada Peserta Mandiri di Kecamatan Alam Barajo

Hasil analisis bivariat antara pendapatan dengan *Ability to Pay* diperoleh *p-value* sebesar 0,000 yang berarti ada hubungan antara pendapatan dengan *Ability to Pay* iuran JKN pada peserta mandiri di Kecamatan Alam Barajo. Hasil perhitungan *risk estimate* diperoleh nilai PR sebesar 3,948 dengan 95% CI: 2,217 – 7,030. Artinya, responden yang memiliki pendapatan rendah mempunyai kemungkinan 3,94 kali untuk tidak mampu membayar iuran dibandingkan responden dengan pendapatan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mandiri dengan pendapatan rendah tidak mau membayar iuran JKN yaitu sebanyak 41 responden (75,0%). Sementara itu, pada peserta mandiri yang memiliki pendapatan tinggi sebagian besar mampu membayar iuran JKN yaitu sebanyak 42 responden (80,8%).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Khumaira et al., 2024), menunjukkan adanya hubungan antara pendapatan dengan kemauan membayar iuran BPJS Kesehatan Kelas III pada pedagang dengan *p-value* sebesar 0,005. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa peserta dengan pendapatan yang tinggi memiliki peluang yang lebih besar untuk menyediakan dana pembayaran iuran dibandingkan peserta dengan pendapatan rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Salman et al., 2025), juga menunjukkan adanya hubungan antara pendapatan dengan *Ability to Pay* iuran JKN dengan *p-value* sebesar 0,000. Kondisi ekonomi peserta menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kemampuan mereka dalam menyediakan dana untuk pembayaran iuran JKN. Penelitian tersebut mengatakan responden dengan pendapatan lebih tinggi memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengalokasikan dana untuk membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional tanpa mengorbankan kebutuhan dasar.

Selanjutnya, penelitian ini sejalan dengan penelitian (Tuan & Dodo, 2023), yang menunjukkan adanya hubungan pendapatan dengan kemampuan membayar iuran JKN dengan *p-value* sebesar 0,000. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi cenderung mampu membayar iuran, Begitupun sebaliknya. Rendahnya tingkat pendapatan berdampak langsung pada ketidakmampuan peserta membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional.⁴³

Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Royyan et al., 2022), yang menunjukkan tidak adanya hubungan pendapatan dengan kemampuan membayar iuran JKN dengan *p-value* sebesar 0,191. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa responden dengan kategori pendapatan tinggi merasa mampu membayar iuran JKN dan apabila mengalami sakit, mereka tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk pengobatan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul *Determinan Willingness to Pay dan Ability to Pay Iuran Jaminan Kesehatan Nasional pada Peserta Mandiri di Kecamatan Alam Barajo*, dapat disimpulkan bahwa pendidikan tidak memiliki hubungan dengan *Willingness to Pay* iuran Jaminan Kesehatan Nasional. Sementara itu, pengetahuan, pendapatan, riwayat penyakit katastropik, dan kualitas layanan memiliki hubungan dengan *Willingness to Pay* iuran JKN. Pada *Ability to Pay*, pendidikan dan pendapatan memiliki hubungan dengan kemampuan peserta mandiri dalam membayar iuran JKN. Dengan demikian, kemauan dan kemampuan membayar iuran JKN pada peserta mandiri dipengaruhi oleh aspek pengetahuan, pendapatan, riwayat penyakit, kualitas layanan, serta tingkat pendidikan.

DAFTAR REFERENSI

- Barus, M. B., & Hasibuan, R. (2026). Analisis Kemampuan dan Kemauan Membayar Iuran JKN Peserta Mandiri di Kecamatan Tanjung Morawa. *Jurnal Kolaboratif Sains*. <https://doi.org/https://doi.org/10.56338/jks.v9i2.10396>
- Haq, M. S., Fachrin, S. A., & Alwi, M. K. (2022). Faktor Yang Berhubungan dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Peserta Mandiri di Puskesmas Rappokalling Kota Makassar. *Window of Public Health Journal*.
- Hildayanti, A. N., Batara, A. S., & Alwi, M. K. (2021). Determinan Ability To Pay dan Willingness To Pay Iuran Peserta Mandiri BPJS Kesehatan di Kecamatan Takabonerate (Studi Kasus di Kabupaten Kepulauan Selayar). *Promotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*.
- Iqbal, M., Yeni, R., & Kusumastuti, I. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar (Willingness to Pay) Iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Pekerja Sektor Informal di Kota Jakarta Timur Tahun 2023. *Indonesian Scholar Journal of Medical and Health*. <https://doi.org/https://doi.org/10.54402/isjmhs.v3i03.596>
- Istamayu, A., Solida, A., & Wardiah, R. (2022). Determinan Kemauan Membayar (Willingness To Pay) Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Pada Peserta Mandiri Di Kota Jambi Tahun 2021. *Akselerasi Jurnal Ilmiah Nasional*.
- Khumaira, L., Herawati, P., Auzi, S., & Gurning, F. P. (2024). Analisis Faktor yang Berhubungan dengan ATP dan WTP Peserta Mandiri dalam Membayar Iuran BPJS Kelas III pada Pedagang di Kelurahan Tuntungan II. *Jurnal Kesehatan Saintika Meditory*.
- Latifah, N., Nabila, W., & Fajrini, F. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Peserta Mandiri Membayar Iuran BPJS di Kelurahan Benda Baru. *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*.
- Masri, N. F., Rusydi, A. R., & Nurgahayu. (2022). Faktor Yang Berhubungan Dengan ATP Dan WTP Dalam Membayar Iuran BPJS 3. *Kesehatan Mandiri. Window of Public Health Journal*. <https://doi.org/https://doi.org/10.33096/woph.v3i4.477>
- Noerdjoedianto, D., Solida, A., & Mekarisce, A. A. (2023). Study of The Willingness to Pay Contributions of Independent National Health Insurance (JKN) Participants in Jambi. *J-Kesmas Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat (The Indonesian Journal of Public Health)*.
- Nurlia, N. A., Murti, B., & Tamtomo, D. G. (2021). Factors Correlated with Willingness and Compliance to Pay National Health Insurance Premium in Jember Regency. *Journal of Health Policy and Management*. <https://doi.org/https://doi.org/10.26911/thejhpm.2021.06.01.04>
- Prakoso, A. D. (2021). Pengaruh Pendapatan, Pengetahuan dan Kerentanan Penyakit terhadap Willingness To Pay (WTP) Premi Jaminan Kesehatan pada Pekerja Sektor Informal. *KESMAS UWIGAMA: Jurnal Kesehatan Masyarakat*.
- Rahmatillah, Lastri, S., & Hasnur, H. (2025). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Membayar Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Mandiri. <https://doi.org/https://doi.org/10.47650/jpp.v8i1.1735>

- Royyan, N., Solida, A., Noerjoedianto, D., Sari, R. E., & Ibnu, I. N. (2022). Analysis Of The Ability To Pay Contributions For Participants In The National Health Insurance (Jkn) For Non-Wage Recipient Workers (Pbpu) In Kota Baru And Jambi Selatan Subdistricts IN 2021. *Lux Mensana: Journal of Scientific Health*.
- Salman, M., Arranury, Z., & Surahmawati. (2025). Determinants of willingness and ability to pay JKN contributions among traders at Gowa Regency, Indonesia. *Community Research of Epidemiology (CORE)*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/corejournal.v6i1.51936>
- Tuan, Y. Y., & Dodo, D. O. (2023). Factors Related to Ability and Willingness to Pay Health Insurance in Non-Wage Workers. *Media Kesehatan Masyarakat*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35508/mkm.v5i3.15258>
- Witati, W., & Putri, P. I. (2020). Determinant of Willingness to Pay Health Insurance Contribution to Informal Workers. *Economics Development Analysis Journal*.